

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan menurut kepustakaan ekonomi pembangunan (Mardikanto, 2013: 11) sering kali didefinisikan sebagai suatu proses yang berkesinambungan untuk mewujudkan peningkatan pendapatan riil perkapita melalui peningkatan jumlah produktifitas sumber daya. Sehingga, dari konsep tersebut munculah pemikiran bahwa pembangunan merupakan upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari berbagai aspek atau sudut pandang, antara lain dari sisi peningkatan tabungan (investasi), produktifitas modal (*capital output ratio*), tingkat konsumsi masyarakat, distribusi pendapatan dan lain-lain. Namun yang tidak kalah penting yang perlu diperhatikan dalam pertumbuhan ekonomi adalah pemerataan pertumbuhan itu sendiri. Tanpa adanya pemerataan suatu pertumbuhan akan timpang, sehingga dalam pembangunan harus ada pemerataan, agar pembangunan tersebut dapat terealisasikan dengan baik dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Ketimpangan pembangunan antara desa dan kota di Indonesia masih menjadi masalah pokok pelaksanaan Pembangunan Nasional, sehingga dewasa ini pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan Pembangunan Nasional agar laju pembangunan daerah serta laju pembangunan desa dan kota semakin seimbang dan serasi. Banyaknya faktor yang mempengaruhi terjadinya ketimpangan pembangunan, sehingga pembangunan di Indonesia tidak merata yang kemudian berdampak pada tingginya kemiskinan di

Indonesia. Terkait dengan masalah kemiskinan, Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki jumlah penduduk 254,9 juta jiwa. Berdasarkan data BPS (<http://www.bps.go.id>, 2015) menyatakan bahwa Indonesia pada bulan Maret 2015 Indonesia memiliki penduduk miskin yang mencapai 28,59 juta orang (11,22 %), bertambah sebesar 0,86 juta orang dibandingkan dengan kondisi pada September 2014 sebesar 27,73 juta orang (10,96 %).

**Tabel 1. 1**  
**Rincian Persentase Kemiskinan di Perkotaan dan Perdesaan**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Penduduk Miskin di Perkotaan</b>	<b>Persentase Kemiskinan di Perkotaan</b>	<b>Jumlah Penduduk Miskin di Perdesaan</b>	<b>Persentase Kemiskinan di Perdesaan</b>
September 2014	10,36 Juta	8,16 %	17,37 Juta	13,76 %
Maret 2015	10,65 Juta	8,29 %	17,94 Juta	14,21 %

*Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia*

Kenaikan persentase penduduk miskin tersebut kemudian dirinci kembali dengan persentase, di daerah perkotaan pada September 2014 sebesar 8,16 %, naik menjadi 8,29 % pada Maret 2015. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan naik dari 13,76% pada September 2014 menjadi 14,21% pada Maret 2015. Selama periode September 2014–Maret 2015, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebanyak 0,29 juta orang (dari 10,36 juta orang pada September 2014 menjadi 10,65 juta orang pada Maret 2015), sementara di daerah perdesaan naik sebanyak 0,57 juta orang (dari 17,37 juta orang pada

September 2014 menjadi 17,94 juta orang pada Maret 2015). Melihat kondisi semakin meningkatnya jumlah penduduk miskin khususnya pada daerah pedesaan yang menyebabkan semakin tingginya tingkat ketimpangan, sehingga pemerintah memiliki strategi untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan menaruh perhatian besar terhadap pembangunan desa dalam melaksanakan pembangunan nasional.

Dalam pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah, Pembangunan desa mempunyai peranan yang penting dan sangat strategis, karena di dalam Pembangunan desa terdapat unsur pemerataan pembangunan. Hasil-hasil pembangunan desa dapat menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bertempat tinggal atau bermukim di perdesaan tersebut dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa secara administratif merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh kepala desa yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Kepala Desa dalam menjalankan suatu pemerintahan desa dibantu oleh staf-staf desa yang menjalankan fungsi sesuai jabatan masing-masing. Pemerintah desa memiliki kewenangan, tugas, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri, karena dalam

pembangunan desa pemerintah desa berkedudukan sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Untuk mampu menyelenggarakan kewenangan, tugas, dan kewajiban dalam menyelenggarakan pemerintahan maupun pembangunan, pemerintah desa membutuhkan sumber pendapatan desa.

Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan desa membutuhkan sumber pendapatan menurut Putra dkk (hal: 1204) yaitu: 1) Desa memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang kecil dan sumber pendapatannya sangat bergantung pada bantuan yang sangat kecil pula. 2) Kesejahteraan masyarakat desa yang rendah sehingga sulit bagi desa mempunyai Pendapatan Asli Desa (PADes) yang tinggi. 3) Masalah itu diikuti dengan rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan publik. 4) Banyak program pembangunan masuk ke desa akan tetapi hanya dikelola oleh Dinas. Program semacam itu mengundang kritikan karena program tersebut tidak memberikan akses pembelajaran bagi Desa, dan program itu bersifat *top down* sehingga cenderung tidak sejalan dengan kebutuhan Desa dan masyarakatnya.

Melihat pentingnya adanya sumber pendapatan desa, maka pemerintah memberikan dukungan keuangan kepada desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, salah satu sumber penerimaan desa yaitu dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota yang dalam pembagiannya untuk setiap desa dibagikan secara proporsional yaitu paling sedikit 10% (sepuluh persen) yang disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Maksud pemberian ADD adalah sebagai perangsang atau *stimulant* yang mampu mendorong pelaksanaan program pemerintah desa. Anggaran alokasi dana

desa tersebut digunakan sebagai penunjang kegiatan otonomi desa agar dapat maksimal dalam memberikan pelayanan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat ditingkat pedesaan. Hal tersebut mendorong pengelolaan Alokasi Dana Desa harus dilakukan dengan jujur dan akuntabel agar kegiatan otonomi desa dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam bidang pemberdayaan masyarakat yang merupakan kegiatan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui upaya mengembangkan atau memberdayakan potensi yang dimiliki. Selain melibatkan masyarakat, kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa juga turut melibatkan beberapa *stakeholders* seperti Kepala Desa, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), dan Bendahara Desa serta masyarakat. *Stakeholders* tersebut diharapkan mampu untuk saling bekerja sama dalam pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Provinsi Jawa Tengah merupakan Provinsi yang memiliki jumlah penduduk terbanyak setelah Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur. Berdasarkan olahan data Jateng dalam Angka Tahun 2015, jumlah penduduk Jawa Tengah tercatat sebesar 33,52 juta jiwa atau sekitar 13,29% dari penduduk Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah, untuk masalah penduduk miskin sendiri, Provinsi Jawa Tengah termasuk provinsi yang mengalami penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin dari tahun 2014 ke tahun 2015, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 1. 2**  
**Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2016**

Tahun	Penduduk Miskin	
	Jumlah/ Total (ribu jiwa)	Persentase
Maret 2014	4 836.45	14.46
September 2014	4 561.83	13.58
Maret 2015	4 577.04	13.58
September 2015	4 505.78	13.32

*Sumber : Data Kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah*

Dari Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa jumlah penduduk miskin pada bulan September 2014 sebesar 4836.45 ribu jiwa (13,5%), kemudian turun di bulan Maret 2015 sebesar 4577.04 ribu jiwa (13,58 %). Penurunan jumlah penduduk yang ada di Provinsi Jawa Tengah merupakan hal yang positif, namun terlepas dari itu, jika dilihat kembali persentase kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah masih tergolong cukup tinggi jika dibandingkan dengan persentase kemiskinan di Indonesia yang hanya mencapai 11,22 % sehingga terdapat indikasi bahwa pembangunan di Provinsi Jawa Tengah masih belum merata. Kabupaten Pati yang merupakan satu dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah juga mengalami penurunan jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin sebagai mana data pada Tabel 1.3 berikut.

**Tabel 1. 3**  
**Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Tingkat Kemiskinan**  
**Kabupaten Pati Tahun 2011-2015**

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Persentase Tingkat Kemiskinan
2011	175.100	14,69 %
2012	162.000	13,61 %
2013	157.900	12,94 %
2014	148.054	12,06 %
2015	147.050	11,95 %

*Sumber: Olahan Data Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Pati*

Data jumlah penduduk miskin dan persentase tingkat kemiskinan kabupaten tersebut menyatakan bahwa dari tahun 2012 hingga 2015 jumlah dan tingkat penduduk miskin di Kabupaten Pati mengalami penurunan, dimana dari tahun 2011 ke 2012 mengalami penurunan 13.100 jiwa (1,08%), kemudian tahun 2012 ke 2013 mengalami penurunan 4100 jiwa (0,67%), tahun 2013 ke 2014 juga mengalami penurunan sebesar 9846 jiwa (0.88%), dan tahun 2014 ke 2015 penurunannya sebesar 1004 jiwa (0,11%). Dari adanya penurunan yang signifikan tersebut mengindikasikan adanya keberhasilan program pembangunan dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Pati.

Selayaknya daerah lainnya di Indonesia dalam melaksanakan pembangunan daerahnya, Kabupaten Pati memberikan dorongan pelaksanaan pembangunan desa dalam bentuk pemberian Alokasi Dana Desa kepada masing-masing desa. Penggunaan Alokasi Dana Desa diperuntukan dalam membiayai berbagai bidang antara lain kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desam pemberdayaan masyarakat desa, dan pembinaan

kemasyarakatan desa. Melihat perincian penggunaan Alokasi Dana Desa tersebut, salah satu penggunaan Alokasi Dana Desa adalah pada pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa yang secara tidak langsung bertujuan untuk mengembangkan potensi masyarakat desa dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu adanya pengelolaan yang baik dari pemerintah desa agar dalam pelaksanaannya dapat sesuai dengan tujuan dan sasaran diberikannya Alokasi Dana Desa.

Kabupaten Pati memiliki 21 Kecamatan salah satu adalah Kecamatan Juwana. Kecamatan Juwana merupakan daerah terbesar kedua di Kabupaten Pati setelah Kecamatan Pati. Dari 21 Kecamatan di Kabupaten Pati, Kecamatan Juwana memiliki potensi pertanian sawah dan tambak yang luas harusnya mampu dikembangkan dengan maksimal. Kecamatan Juwana yang terkenal dengan simbol Kota Bandeng seharusnya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, melalui pemberdayaan sumber daya yang dimiliki tersebut. Berdasarkan data kependudukan Kecamatan Juwana terdiri atas 29 desa yang terdiri atas 87 RW dan 362 RT dengan total luas daerah 55,93 km<sup>2</sup> dengan penduduk berjumlah 96.827 jiwa. Sebagai kecamatan terbesar nomor dua di Kabupaten Pati, Kecamatan Juwana masih memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Berdasarkan data penerima bantuan Beras Miskin (Raskin) terdapat 5.564 RTS-PM penerima bantuan raskin per bulan Oktober 2016, dengan rincian sebagai berikut pada Tabel 1.4.

**Tabel 1. 4**  
**Jumlah Warga Miskin Penerima Bantuan Beras Miskin (Raskin) dan**  
**Pendapatan Alokasi Dana Desa (ADD) Kecamatan Juwana**

No.	Nama Desa	Jumlah Penerima (RTS-PM)	Jumlah Alokasi Dana Desa
1.	Agungmulyo	91	293.937.000
2.	Bendar	105	255.316.000
3.	Bajomulyo	183	256.663.000
4.	Bakaran Kulon	236	272.397.000
5.	Bakaran Wetan	180	255.094.000
6.	Bringin	201	251.327.000
7.	Bumirejo	129	259.017.000
8.	Dukutalit	204	254.024.000
9.	Doropayung	159	253.621.000
10.	Gadingrejo	189	271.398.000
11.	Geneng Mulyo	119	256.526.000
12.	Growong Kidul	242	252.617.000
13.	Growong Lor	242	251.528.000
14.	Jepuro	22	256.252.000
15.	Kebonsawahan	51	254.826.000
16.	Kudukeras	226	254.666.000
17.	Kedung Pancing	78	248.916.000
18.	Karang	270	304.857.000
19.	Karangrejo	309	255.367.000
20.	Ketip	120	264.218.000
21.	Kauman	34	257.744.000
22.	Langgenharjo	418	363.767.000
23.	Margomulyo	472	349.472.000
24.	Mintomulyo	172	329.618.000
25.	Pajeksan	51	253.515.000
26.	Pekuwon	275	268.615.000
27.	Sejomulyo	396	347.631.000
28.	Tluwah	58	257.189.000
29.	Trimulyo	388	343.514.000
<b>Jumlah</b>		<b>5.564</b>	<b>7.993.632.000</b>

*Sumber: Olahan Data Kecamatan Juwana Tahun 2016; Keputusan Bupati Pati Nomor 412.4/313 Tahun 2017 Tentang Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima oleh Desa di Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2017*

Melihat data tersebut jumlah penduduk miskin terbanyak dilihat dari jumlah penerima bantuan beras miskin (raskin) terdapat di Desa Margomulyo dengan jumlah 472 RTS-PM. Berdasarkan data pada Tabel 1.3 tersebut jumlah penduduk miskin yang terdapat di Desa Margomulyo berdasarkan data penerima bantuan raskin merupakan jumlah penduduk miskin tertinggi di Kecamatan Juwana. Dilain sisi, Alokasi Dana Desa yang diberikan kepada Desa Margomulyo adalah sebesar Rp 349.472.000,00 dimana jumlah tersebut merupakan jumlah Alokasi Dana Desa terbesar ke dua yang diberikan kepada desa yang terdapat di Kecamatan Juwana setelah Desa Langgenharjo.

Data pada Tabel 1.3 menunjukkan bahwa meskipun mendapatkan ADD terbesar ke dua di Kecamatan Juwana, Desa Margomulyo tetap memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi se-Kecamatan Juwana, dilain sisi Desa Margomulyo sendiri memiliki potensi pertanian yang seharusnya mampu dikembangkan dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desa Margomulyo merupakan desa yang terdiri dari 3 dukuh yakni Dukuh Gempol, Dukuh Kalangan dan Dukuh Kedalon yang memiliki lahan pertanian yang masih cukup luas.

**Gambar 1. 1**  
**Lahan Pertanian Desa Margomulyo**



*Sumber : Pengambilan gambar pada tanggal 7 Mei 2017*

Desa Margomulyo merupakan desa yang mayoritas penduduknya bermatapencapaian sebagai petani. Sektor pertanian masih menjadi sektor yang harusnya mampu dikembangkan oleh pemerintah, melihat kondisi geografis Indonesia khususnya Jawa Tengah yang merupakan daerah yang memiliki lahan yang subur. Sebagai bagian dari wilayah Provinsi Jawa Tengah lahan pertanian di Desa Margomulyo sendiri masih bisa dikatakan cukup luas, sehingga dengan adanya potensi pertanian yang dimiliki Desa Margomulyo pemerintah desa harusnya mampu memberdayakan potensi pertanian tersebut agar dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pati telah memberikan Alokasi Dana Desa sebagai *stimulant* atau pendorong pemberdayaan masyarakat, seharusnya Alokasi Dana Desa (ADD) ini dapat digunakan Pemerintah Desa Margomulyo untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat berdasarkan potensi yang dimiliki sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa tersebut. Berdasarkan Surat Edaran Bupati Nomor 142.22/579 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2017, dalam rangka mengelola Alokasi Dana Desa tersebut salah satunya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang meliputi 1) Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa; 2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat; 3) Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB; 4) Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat; 4) Kegiatan Pelatihan Teknologi Tepat Guna; dan 6) Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil dan Industri Rumah Tangga.

Tingginya Alokasi Dana Desa yang diterima Desa Margomulyo, seharusnya dapat mempermudah pemerintah desa dalam membiayai kegiatan pemberdayaan sehingga mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun faktanya tingkat kemiskinan Desa Margomulyo yang paling tinggi di Kecamatan Juwana. Sehingga dalam penelitian ini perlu dilakukan **ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA MARGOMULYO.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Margomulyo?
2. Apa faktor pendorong dan penghambat pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Margomulyo?
3. Bagaimana upaya meningkatkan pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Margomulyo?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan penelitian yang ada, maka secara spesifik tujuan dari penelitian adalah :

1. Mengetahui pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan di Desa Margomulyo dalam mengurangi tingkat kemiskinan.
2. Menganalisis faktor pendorong dan penghambat dalam pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Margomulyo.
3. Untuk merumuskan upaya peningkatan pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan di Desa Margomulyo.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam upaya pengembangan teori-teori ilmu sosial dan politik secara umum, dan

pengembangan pada bidang manajemen publik yang fokusnya terhadap analisis pengelolaan keuangan dalam pemberdayaan masyarakat

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Selain kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan berguna bagi:

1. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai analisis pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Pati khususnya di Desa Margomulyo.

2. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya koleksi penelitian ilmiah yang dapat digunakan dalam bahan rujukan bagi berbagai penelitian ilmiah selanjutnya, yang terkait dengan topik ini.

3. Bagi Pemerintah Kabupaten Pati.

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan kepada pemerintah kota dalam memecahkan masalah kemiskinan melalui analisis pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki.

4. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan yang berguna bagi masyarakat terkait pengelolaan alokasi dana desa dalam

pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Pati khususnya di Desa Margomulyo dalam mengurangi tingkat kemiskinan.

## **1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis**

### **1.5.1 Penelitian Terdahulu**

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian tersebut menjadi referensi bagi peneliti dalam melakukan penelitian ini. Penelitian tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Candra Kusuma Putra, Ratih Nur Prastiwi, dan Suwondo dalam Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 1 No.6 Hal.1203-1212 yang berjudul Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). Penelitian tersebut memiliki tujuan untuk menggambarkan dan menganalisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat, dan melihat faktor-faktor pendorong dan penghambat pengelolaan ADD dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. Hasil dari penelitian tersebut adalah sebagian dari dana ADD yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD sehingga penggunaan ADD tidak sesuai peruntukannya. Faktor pendukung dalam pengelolaan ADD dalam pemberdayaan masyarakat terdiri dari tiga faktor *pertama*, tingginya partisipasi masyarakat khususnya dalam proses perencanaan; *kedua*, budaya gotong-royong masyarakat yang merupakan potensi desa dalam pengelolaan

ADD; *ketiga*, pengawasan secara fungsional dari Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kecamatan dapat meningkatkan kedisiplinan pemerintah desa dalam pengelolaan ADD. Faktor penghambat dalam pengelolaan ADD untuk pemberdayaan masyarakat di desa wonorejo sendiri adalah sumber daya manusia (SDM) dari perangkat desa dan penduduk desa yang masih rendah, dan rendahnya pengawasan terhadap pengelolaan ADD.

2. Faizatul Karimah, Choirul Saleh, dan Ike Wanusmawatie dalam Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol.2 No.4 Hal.597-602 yang berjudul Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat (studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan). Penelitian ini memberikan deskripsi tentang pengelolaan alokasi dana desa di desa Deket Kulon dalam pemberdayaan masyarakat, hasil-hasil pemberdayaan masyarakat dari Anggaran ADD dan melihat faktor-faktor yang mendorong pengelolaan ADD. Hasil dari penelitian tersebut adalah secara normatif pengelolaan ADD di Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan sudah baik namun, secara substansi ada beberapa hal yang harus diperbaiki yaitu partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan, pengawasan, pertanggung jawaban dan transparansi yang belum maksimal, karena masyarakat tidak banyak yang mengetahui akan adanya kegiatan tersebut. Peran *stakeholder* pada pengelolaan ADD dalam pemberdayaan masyarakat juga belum maksimal. Hasil pemberdayaan yang didanai oleh anggaran ADD meliputi pemberdayaan lingkungan dan

pemberdayaan manusia. Faktor yang mendukung pengelolaan ADD yaitu adanya peraturan yang jelas yang membuat tim pelaksana tidak kebingungan dalam mengelola anggaran ADD, dan partisipasi masyarakat yang tinggi dalam pelaksanaan. Sedangkan, faktor penghambatnya yaitu sosialisasi yang kurang mendalam kepada masyarakat dan rendahnya pengawasan serta dominasi pemerintah kecamatan terhadap penyusunan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) ADD.

3. Okta Rosalinda LPD (2014) dengan judul penelitian Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus: Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang). Penelitian ini memberikan deskripsi tentang pengelolaan ADD dalam menunjang pembangunan pedesaan oleh pemerintah Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep. Hasil penelitian ini adalah tata kelola dana ADD masih nampak belum efektif, mekanisme perencanaan dengan waktu yang sempit, kurang berjalannya fungsi lembaga desa, partisipasi masyarakat rendah karena dominasi kepala desa dan adanya pos-pos anggaran dalam pemanfaatan ADD tidak ada kesesuaian dengan kebutuhan desa. Faktor yang mendukung pelaksanaan ADD meliputi potensi penerimaan desa yang mendukung dan adanya dukungan kebijakan pemerintah. Sedangkan, faktor penghambat meliputi manajemen organisasi pemerintah desa yang kurang baik, sumber daya manusia yang kurang, kurangnya sarana prasarana, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan ADD.

4. Nunuk Riyani (2016) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perencanaan dana desa di desa Singopuran dan mendeskripsikan evaluasi dana desa di Desa Singopuran Tahun 2016. Hasil Penelitian ini adalah Penggunaan Dana Desa di Desa Singopuran semuanya digunakan untuk pembangunan masyarakat seperti pembuatan jalan aspal, gotong-royong, talut desa, PKK dan ATK. Evaluasi Dana Desa tidak terlepas dari kendala dalam pengerjaan yang meliputi:

- a. Masyarakat yang kurang peduli terhadap pembangunan di daerahnya, tidak adanya rasa toleransi dan kerja sama. Karena hanya sebagian rakyat yang ikut gotong royong dalam pembangunan dan gotong royong dilaksanakan ketika mereka berangkat kerja jadi kurangnya tenaga untuk melaksanakan kegiatan akhirnya perangkat desa mencari pekerja dari luar untuk menyelesaikan pembangunan dengan tepat waktu.
- b. Perangkat desa yang belum maksimal dalam pertanggungjawaban dalam Dana Desa.
- c. Bahan yang datangnya tidak tepat waktu dan kehabisan pasir karena pembelian yang mendadak sehingga stok habis menjadikan pembangunan melebihi hari yang sudah ditentukan.
- d. Cuaca yang kurang mendukung juga menambah hari untuk pembangunan.

5. Kristina Korniti Kila (2017) yang berjudul Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan faktor penghambat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Miau Baru. Hasil Penelitian ini adalah pengelolaan ADD dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat Mengenai pengelolaan ADD dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Miau Baru telah terlaksana dan diperuntukan untuk masyarakat yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Namun, dalam penyusunan rencana kegiatan ADD partisipasi masyarakat masih kurang, karena masyarakat hanya sebagai pendengar dan tidak mendapat kesempatan untuk menyampaikan aspirasi ketika rapat perencanaan. Pengawasan pengelolaan ADD juga kurang optimal Faktor penghambat pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Miau Baru yaitu kualitas sumberdaya manusia yang masih rendah, kurangnya tenaga teknis dan faktor cuaca, serta terlambatnya proses pencairan dana membuat pelaksanaan kegiatan pembangunan tidak dapat terselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

**Tabel 1. 5**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>NO.</b>	<b>PENULIS, TAHUN</b>	<b>OBJEK PENELITIAN</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>	<b>HASIL PENELITIAN</b>	<b>PERBEDAAN PENELITIAN</b>
1	Candra Kusuma P. Dkk	Masyarakat Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang	Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan studi kasus.	Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD sehingga penggunaan ADD tidak sesuai peruntukannya.	Penelitian penulis tidak hanya melihat pengelolaan ADD saja akan tetapi juga melihat faktor yang mempengaruhi pengelolaan ADD dalam pemberdayaan masyarakat di lokus yang berbeda.
2	Faizatul Karimah dkk	Masyarakat Deket Kulon, Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan	Penelitian ini menggunakan pendekatan Deskriptif kualitatif dengan studi kasus	Pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan secara normatif dan administratif sudah baik. Namun harus diperbaiki seperti partisipasi masyarakat dalam tahap	Pada penelitian yang penulis lakukan akan lebih memfokuskan pada analisis pengelolaan ADD untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan faktor yang mempengaruhi tanpa melihat secara detail bagaimana hasil

NO.	PENULIS, TAHUN	OBJEK PENELITIAN	METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN	PERBEDAAN PENELITIAN
				perencanaan, pengawasan, pertanggungjawaban, dan transparansi. Peran <i>stakeholder</i> pada pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masih belum maksimal.	pemberdayaan masyarakat secara umum. Selanjutnya dalam penelitian ini juga memberikan rekomendasi upaya meningkatkan pengelolaan ADD di lokus penelitian.
3	Okta Rosalinda LPD, 2014	Masyarakat Desa Segodorejo dan Masyarakat Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif , dengan pendekatan deskriptif analitis dan tekni pencarian data melalui wawancara dan studi kepustakaan	Tata kelola dana ADD masih nampak belum efektif, mekanisme perencanaan dengan waktu yang sempit, kurang berjalannya fungsi lembaga desa, partisipasi masyarakat rendah karena dominasi kepala desa dan adanya pos-pos anggaran dalam pemanfaatan ADD tidak ada kesesuaian dengan kebutuhan desa.	Penelitian yang dilakukan penulis akan melihat pengelolaan ADD di lokus yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, kemudian melihat faktor yang mempengaruhi tidak hanya dari sisi masyarakat namun juga dari sisi pemerintah desa sebagai pengelola ADD dalam pemberdayaan masyarakat tersebut.

NO.	PENULIS, TAHUN	OBJEK PENELITIAN	METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN	PERBEDAAN PENELITIAN
4	Nunuk Riyani, 2016	Kepala desa, Sekretaris Desa, Kaur Pembangunan dan beberapa masyarakat Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo	Penelitian ini menggunakan metode interaktif (menghimpun data, mengambil makna dan memperoleh pemahaman terhadap suatu kasus), dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, menelaah dokumen, dan melakukan observasi	Penggunaan dana desa sepenuhnya untuk pembangunan. Evaluasi untuk penggunaan Dana Desa di Desa Singopuran terdapat masalah-masalah seperti - Masyarakat yang kurang peduli terhadap pembangunan - Perangkat desa yang belum maksimal dalam pertanggungjawaban Dana Desa - Bahan yang datangnya tidak tepat waktu - Cuaca yang kurang mendukung	Perbedaan dengan penelitian ini terdapat pada fokus keuangan desa yang dikelola, jika di penelitian ini yang difokuskan adalah pengelolaan Dana Desa, sedangkan pada penelitian penulis memfokuskan pada Alokasi Dana Desa dengan lokus penelitian yang berbeda.

<b>NO.</b>	<b>PENULIS, TAHUN</b>	<b>OBJEK PENELITIAN</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>	<b>HASIL PENELITIAN</b>	<b>PERBEDAAN PENELITIAN</b>
5	Kristina Korniti Kila, 2017	Masyarakat desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur	Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.	Dalam penyusunan rencana kegiatan ADD partisipasi masyarakat masih kurang, karena masyarakat hanya sebagai pendengar dan tidak mendapat kesempatan untuk menyampaikan aspirasi ketika rapat perencanaan. Pengawasan pengolaan ADD juga kurang optimal.	Selain perbedaan pada objek penelitian yang penulis lakukan akan tidak hanya melihat pada proses pengelolaan di setiap tahapannya tetapi juga melihat faktor yang mempengaruhi dalam pengelolaan ADD tersebut.

Melihat perbandingan antar penelitian yang terdapat dalam Tabel 2.1 terdapat perbedaan antara masing-masing penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Penelitian yang dilakukan oleh Candra Kusuma, Ratih Nur Prastiwi dan Suwondo dengan objek penelitian Masyarakat Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif berhasil menguraikan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemberdayaan masyarakat masih dipergunakan untuk biaya operasional Pemerintah Desa dan BPD sehingga masih belum sesuai dengan peruntukannya. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Candra Kusuma dan kawan-kawan terdapat pada lokus yang berbeda dan penelitian yang akan dilakukan tidak hanya melihat pengelolaan ADD yang telah berjalan melainkan juga melihat faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan ADD, baik faktor yang mendorong dan menghambat keberhasilan pengelolaan ADD tersebut, sehingga dapat merumuskan rekomendasi upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengelolaan ADD.

Penelitian yang akan dilakukan juga memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Faizatul Karimah dkk, dimana dalam penelitian yang dilakukan Faizatul Karimah dkk dengan objek penelitian Masyarakat Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus berhasil menemukan bahwa pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat secara normative dan administratif sudah baik namun harus diperbaiki seperti

partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan, pengawasan, pertanggungjawaban dan transparansi. Penelitian ini juga menguraikan bahwa peran *stakeholder* pada pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masih belum maksimal. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan terdapat pada lokus penelitian dan fokus pada analisis pengelolaan ADD, dan faktor yang mempengaruhi pengelolaan tanpa melihat detail bagaimana hasil pemberdayaan seperti yang dilakukan pada penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan penulis juga mencoba memberikan rekomendasi upaya peningkatan pengelolaan Alokasi Dana Desa agar lebih baik.

Penelitian terdahulu selanjutnya telah dilakukan oleh Okta Rosalinda pada tahun 2014 dengan objek penelitian masyarakat Desa Segodorejo dan masyarakat Desa Ploso Kerep Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Dalam penelitian ini berhasil menguraikan tata kelola ADD yang masih belum efektif akibat perencanaan dengan waktu yang terbatas dan kurang fungsinya lembaga desa serta rendahnya partisipasi masyarakat. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Okta Rosalinda terdapat perbedaan lokus penelitian, dalam penelitian yang akan dilakukan penulis akan melihat faktor yang mempengaruhi pengelolaan ADD tidak hanya dari sisi masyarakat namun juga dari sisi pemerintah desa sebagai pengelola ADD tersebut.

Penelitian yang akan dilakukan ini juga berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan Nunuk Riyani pada tahun 2016, dimana penelitiannya memiliki

objek Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Pembangunan, dan beberapa masyarakat Desa Singopuran Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Penelitian yang menggunakan metode interaktif (menghimpun data kemudian mengambil makna dan memperoleh pemahaman atas suatu kasus) berhasil menyimpulkan bahwa penggunaan dana desa sepenuhnya digunakan untuk pembangunan bukan untuk pemberdayaan masyarakat. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu ini terdapat pada lokus penelitian yang berbeda dan fokus pengelolaan keuangan desa yang dianalisis bukan Dana Desa (DD) melainkan lokasi Dana Desa (ADD).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu selanjutnya dilihat dari penelitian Kristina Korniti pada tahun 2017 dengan objek penelitian Masyarakat Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur. Dalam penelitian yang menggunakan metode penelitian analisis deskriptif kualitatif, menyimpulkan bahwa dalam penyusunan rencana ADD partisipasi masyarakat masih kurang, pengawasan pengelolaan ADD juga kurang maksimal. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan penulis dengan penelitian terdahulu ini terdapat pada lokus yang berbeda dan fokus penelitian tidak hanya terbatas pada proses pengelolaan di setiap tahapannya tetapi juga faktor yang mempengaruhi dalam pengelolaan ADD tersebut yang belum dilihat dalam penelitian terdahulu ini.

### **1.5.2 Administrasi Publik**

Sebagai disiplin ilmu Administrasi Publik bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui peningkatan dalam berbagai bidang diantaranya bidang organisasi, sumber daya manusia dan keuangan. Administrasi publik sebagai disiplin ilmu tentu mengalami pergeseran paradigma. Terdapat lima pergeseran paradigmana administrasi publik menurut Henry dalam Keban (2008: 31-33), yaitu:

1. Paradigma Dikotomi Politik dan Administrasi menjelaskan bahwa ada pemisahan antara politik dan administrasi.
2. Paradigma Prinsip-prinsip Administrasi yang memiliki fokus administrasi publik, sedangkan lokusnya masih belum jelas.
3. Paradigama Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik bahwa administrasi publik sebagai ilmu politik yang lokusnya birokrasi pemerintahan dan fokusnya menjadi kabur.
4. Paradigma Admnistrasi Publik sebagai Ilmu Admnistrasi yang didalamnya terdapat pengembangan prinsip-prinsip manajemen secara ilmiah dan mendalam merupakan fokusnya, sedangkan lokusnya tidak jelas karena semua fokus diasumsikan bisa diterapkan di swasta dan publik.
5. Paradima Adminsitrasi Publik sebagai Admnistrasi Publik, fokusnya adalah teori organisasi, manajemen, dan kebijakan publik; sedangkan lokusnya adalah masalah-masalah kepentingan publik.

Selain pergeseran paradigma menurut Hendry tersebut, juga ada empat pergeseran paradigma administrasi publik menurut G. Shabbir Cheema dalam Keban (2008: 37-38), yakni :

1. *Traditional public administration*, yang berorientasi pada hirarki, kontinuitas, ketidakberpihakan, standarisasi, legal-retional, otoritas, dan profesionalitas.
2. *Public Management*, yang menguatkan pada penerapan prinsip-prinsip manajemen termasuk efisiensi dalam pemakaian sumber daya, efektivitas, orientasi pada pelnaggan, dan lain-lain.
3. *New Public Management*, yang diarahkan pada prinsip fleksibilitas, pemberdayaan, inovasi, dan orientasi hasil yang berbasis kinerja.
4. *Governance*, suatu sistem nilai, kebijakan, dan kelembagaan dimana urusan-urusan ekonomi, sosial, dan politik dikelola melalui interaksi antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. Paradigma ini mengutamakan mekanisme dan proses dimana warga masyarakat dan kelompok dapat mengartikulasikan kepentingannya.

Dari penjelasan paradigma tersebut dapat dilihat bahwa belakangan perubahan orientasi administrasi publik berlangsung secara cepat. Terkandung beberapa elemen penting di dalam Administrasi Publik yang terkait dengan Pemerintah dan Masyarakat Umum (Publik). Sehingga fokus administrasi publik, tidak hanya pada pemerintahan akan tetapi juga pada masyarakat umum (publik).

Berdasarkan uraian tentang paradigma administrasi publik yang telah dijabarkan sebelumnya secara konseptual, terdapat dua fokus dalam teori administrasi publik yaitu pengelolaan birokrasi (Manajemen Publik) dan pengambilan keputusan (Kebijakan Publik). Peneliti memfokuskan pada paradigma adminitrasi publik sebagai administrasi publik yang memiliki fokus pada pengelolaan birokrasi atau manajemen publik yang berbasis *New Public Management* yang didalamnya terdapat prinsip pemberdayaan.

### **1.5.3 Manajemen**

Pengertian manajemen didefinisikan secara beragam oleh para pakar, seperti yang sering ditemukan dalam beberapa tulisan dan literatur tentang studi manajemen. Beberapa pendapat tersebut antara lain adalah :

- 1) G.R Terry (1960) Manajemen adalah melakukan pencapaian tujuan organisasi yang sudah ditentukan sebelumnya dengan mempergunakan bantuan orang lain.
- 2) John M Prifner (1960) Manajemen berhubungan dengan pengarahan orang dan tugas –tugasnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan
- 3) Stoner dan Freeman Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pemimpin dan pengendalian upaya anggota organisasi dan proses penggunaan semua lain-lain sumber daya organisasi untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan definisi – definisi yang telah dikemukakan, seorang manajer akan dinilai berhasil, apabila dalam mencapai tujuan ia mampu menggerakkan orang lain dan mengelola sumber-sumber daya lainnya yang ada dalam organisasi sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Dalam penelitian ini akan melihat konsep manajemen pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan konsep manajemen yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pelaporan.

Manajemen sendiri memiliki beberapa fungsi-fungsi dalam suatu organisasi, banyak ahli yang mencoba menguraikan pendapat tentang fungsi-fungsi manajemen tersebut salah satunya G.R Terry dalam Handoko (2008: 21-26) menyatakan bahwa terdapat empat fungsi manajemen yang pada intinya adalah sebagai berikut:

- a. *Planning* (Perencanaan), merupakan langkah pertama yang dilakukan dalam organisasi yang berisi kegiatan penetapan tujuan organisasi, penentuan strategi atau langkah-langkah yang nantinya akan dilakukan sebagai upaya mencapai tujuan tersebut.
- b. *Organizing* (Pengorganisasian), yaitu kegiatan mengembangkan suatu organisasi agar mampu melaksanakan langkah-langkah yang telah ditentukan dengan menggunakan sumber daya organisasi yang dimiliki. Pada dasarnya dalam pengorganisasian terdapat kegiatan pemberian tugas, pendelegasian wewenang, melakukan koordinasi antara atasan dan bawahan dalam mencapai tujuan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan mengkoordinasikan hal-hal yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan.
- c. *Actuating* (Pengarahan), adalah kegiatan untuk membuat bawahan melakukan hal-hal yang diinginkan atau yang harus dilakukan. Sehingga dalam fungsi ini mencakup tindakan seorang manajer dalam mempengaruhi bawahannya agar mau melakukan hal-hal yang diinginkan demi mencapai tujuan organisasinya. Fungsi *Actuating* juga

memiliki istilah lain seperti *leading*, *motivating*, *directing*, *commanding* dan lain-lain.

- d. *Controlling* (Pengawasan), merupakan fungsi yang dapat dikatakan penting dalam sebuah organisasi, sebab tanpa pengawasan fungsi-fungsi sebelumnya tidak akan berjalan dengan efektif dan efisien. Tujuan adanya pengawasan adalah untuk memastikan bahwa apa yang telah direncanakan dan dilakukan sudah berjalan dengan baik dan mendorong terwujudnya tujuan yang telah ditetapkan. Selain untuk melihat sejauh mana suatu hal yang telah ditetapkan sudah berjalan, fungsi pengawasan juga bertujuan untuk memastikan hal yang sudah dilakukan tidak melenceng dari tujuan yang ada. Pada dasarnya di dalam fungsi pengawasan terdapat kegiatan monitoring, evaluasi, pengecekan hasil kerja, dan pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan. Hasil dari fungsi pengawasan selanjutnya digunakan untuk pedoman perumusan perencanaan kedepannya.

Fungsi-fungsi manajemen tersebut membentuk siklus yang saling berkesinambungan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan hingga pengawasan saling terkait dan tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan manajemen suatu organisasi.

#### **1.5.4 Manajemen Publik**

Munurut Perry dan Kraemer dalam Keban (2008: 100) terdapat empat prinsip dasar bagi studi administrasi publik yang mewarnai manajemen publik sampai sekarang yaitu :

- 1) Pemerintah sebagai setting utama organisasi;
- 2) Fungsi eksekutif sebagai fokus utama;
- 3) Pencarian prinsip-prinsip dan teknik manajemen yang lebih efektif sebagai kunci pengembangan kompetensi administrasi, dan
- 4) Metode perbandingan sebagai metode studi dan pengembangan bidang administrasi publik

Manajemen Publik merupakan bagian dari Administrasi yang berbicara tentang pengelolaan birokrasi yang baik dan benardalam memberikan pelayanan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pada penelitian menggunakan konsep manajemen publik untuk melihat upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam memajemen atau mengelola alokasi dana desa yang diberikan untuk menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat melalui peroses pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana kesejahteraan masyarakat merupakan kebutuhan publik/masyarakat yang harus dipenuhi dan dilayani oleh pemerintah.

#### **1.5.5 Pembangunan**

Monsour Fakis dalam Soetomo (2013: 31) mengartikan *development* merupakan ideologi perubahan sosial dan realitas kehidupan masyarakat, sehingga konsep

pembangunan bersifat netral. Selanjutnya, Riyadi dalam Mardikanto (2013: 3) menyatakan pembangunan adalah suatu proses perubahan masyarakat yang mencakup individu-individu yang menginginkan adanya perubahan.

Dalam bukunya yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat Totok Merdikanto (2013: 4-5) menjelaskan bahwa terdapat banyak pokok pemikiran dalam mendefinisikan istilah pembangunan antara lain yaitu:

1. Pembangunan adalah proses atau rangkaian yang tidak pernah kenal berhenti, untuk terus menerus mewujudkan perubahan-perubahan dalam kehidupan masyarakat dalam rangka mencapai perbaikan mutu-hidup, dalam situasi lingkungan kehidupan yang juga terus menerus mengalami perubahan-perubahan.
2. Proses pembangunan yang terjadi, bukanlah sesuatu yang sifatnya alami atau “*given*”, melainkan suatu proses yang dilaksanakan dengan sadar dan terencana. Artinya pembangunan tersebut dilaksanakan melalui suatu proses perencanaan terlebih dahulu, untuk menganalisis masalah-masalah atau kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi, tujuan-tujuan yang ditetapkan atau yang hendak dicapai, alternative pencapaian tujuan dan pengambilan keputusan tentang car-cara mencapai tujuan yang terpilih, dengan senantiasa mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan resiko yang harus dihadapi.
3. Proses perubahan yang akan dilaksanakan dan ingin dicapai dalam setiap pembangunan, adalah perubahan yang menyeluruh yang mencakup beragam aspek dan tatanan kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Bukan hanya yang bersifat ekonomi yang berupa kenaikan pendapat, pertumbuhan, dan pemerataan serta hal-hal lain yang dapat diukur dengan indikator-indikator ekonomi, melainkan juga mencakup aspek non-materiil yang ditujuakan untuk membawa perubahan mentalifas, sikap dan moral masyarakat.
4. Pembangunan adalah sesuatu yang: dari, oleh dan untuk masyarakat, sehingga pembangunan bukanlah kegiatan yang direncanakan, dilaksanakan dan dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan segolongan atau sekelompok warga masyarakat. Pembangunan masyarakat melibatkan partisipasi seluruh warga masyarakat, sejak perencanaan pembangunan, sampai pada pelaksanaan dan pengawasan kegiatan, serta pemanfaatan hasil-hasilnya oleh masyarakat, sehingga pembangunan disini tidak hanya dilakuka pemerintah tapi juga bersama-sama masyarakat.
5. Pembangunan adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat yang bersangkutan. Artinya pembangunan harus benar-benar dimaksudkan untuk memperbaiki mutu-hidup setiap

individu dan masyarakatnya, dan bukannya mengorbankan manusia (dan masyarakatnya) demi tercapainya tujuan pembangunan. Dalam pencapaian tujuan tersebut perlu adanya teknologi yang mendukung.

Selaras dengan kelima pokok pemikiran dapat dikatakan bahwa pembangunan merupakan kegiatan yang dilakukan secara sadar dan terencana serta berkelanjutan yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam segala proses pembangunan baik dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pelaporan dan pertanggung jawaban.

Sumodiningrat dalam (Randy dan Riant, 2007:52-60) menyatakan kecenderungan perkembangan konsep pembangunan di Indonesia dapat diikuti dari konsep *growth strategy* hingga konsep *empowerment*.

1. Strategi Pertumbuhan (*Growth Strategy*)  
Pendekatan ini memfokuskan diri pada pembangunan industri secara besar-besaran sehingga kedudukan pemerintah dalam pendekatan ini lebih memainkan peran sebagai *entrepreneur* daripada sebagai *service provider*, peningkatan ekonomi hanya dapat dirasakan oleh beberapa orang saja, terutama para pemilik modal dan kelompok elit.
2. Pertumbuhan dan Distribusi (*Growth with Distribution*)  
Fokus strategi pendekatan ini mengarahkan pada penyediaan atau penciptaan lapangan pekerjaan langsung bagi masyarakat sebagai alat untuk mendistribusikan pertumbuhan dan kesejahteraan yang dihasilkan mesin ekonomi nasional.
3. Teknologi Tepat-Guna (*Appropriate Technology*)  
Pendekatan ini lebih menekankan pada penggunaan teknologi dalam memanfaatkan sumberdaya lokal yang tersedia sebagai sumber penghasilan penduduk. Namun, pendekatan ini juga belum mampu menciptakan pemerataan pendapat dan pertumbuhan nasional dalam rangka mengurangi jurang kesenjangan ekonomi, sosial, dan spasial.
4. Kebutuhan Dasar (*Basic Needs Development*)  
Konsep dasar pendekatan ini adalah menyediakan kebutuhan minimum bagi penduduk yang tergolong miskin. Kebutuhan minimum yang dimaksud tidak terbatas pada pangan-pakaian-papan saja, melainkan juga kemudahan akses pada pelayanan air bersih, sanitasi, transport, kesehatan, dan pendidikan.

5. Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)  
Pendekatan ini juga mengartikan bahwa pembangunan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa merugikan kebutuhan generasi masa mendatang, dengan memperhatikan keberlanjutan dari sumber daya yang digunakan.
6. Pemberdayaan (*Empowerment*)  
Konsep *empowerment* pada intinya menekankan pada otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat, yang berlandas pada sumber daya pribadi, langsung (melalui partisipasi), demokrasi, dan pembelajaran sosial melalui pengalaman langsung.

Konsep pembangunan dalam penelitian ini lebih cenderung pada penerapan konsep yang digagas oleh Mardikanto dimana ada 5 (lima) pandangan tentang pembangunan kelima pokok pemikiran dapat dimana inintinya pembangunan dilakukan secara sadar mulai dari perencanaan hingga penggunaan hasilnya dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan pemberdayaan. Selanjutnya dalam penelitian ini berfokus pada konsep pembangunan yang berbasis pemberdayaan yang digagas oleh Wrihatnolo dan Dwijiwinoto yang melibatkan partisipasi menekankan pada otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat, sehingga masyarakat tersebut mampu mengembangkan potensi yang dia miliki.

### **1.5.6 Pemberdayaan**

Pemberdayaan merupakan bagian dari proses pembangunan, pemberdayaan memiliki tujuan untuk menggali potensi yang dimiliki masyarakat untuk kemudian dikembangkan atau diolah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Pemberdayaan tidak selalu berbicara tentang output pada

peningkatan ekonomi masyarakat, tetapi juga perubahan sikap, pola pikir dan mental masyarakat kearah yang lebih baik.

Pemberdayaan sendiri banyak didefinisikan oleh banyak pakar antara lain yaitu menurut Rappaport (Totok Mardikanto, 2013: 26) mengartikan *“Empowerment is viewed as a process: the mechanism by which people, organization and communities gain mastery over their lives.”* Melihat pengertian tersebut pemberdayaan dapat diterjemahkan sebagai suatu cara agar rakyat, komunitas, dan organisasi diarahkan agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya.

Sumodiningrat (Mardikanto, 2013: 29) menyatakan bahwa hakikat dari pemberdayaan berpusat pada manusia dan kemanusiaan, dimana manusia dan kemanusiaan sebagai tolok ukur normatif, struktural, dan substansial.

Secara tersirat pemberdayaan memberikan penekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat yang dilandasi dengan penerapan aspek demokratis, partisipasi dengan titik fokus pada lokalitas, sehingga masyarakat akan merasa siap diberdayakan melalui isu-isu lokal, seperti yang dinyatakan oleh Anthony Bebbington (Mardikanto, 2013: 30) yakni *“Empowerment is a process through which those exclude are able to participate more fully in decisions about forms of growth strategies of development, and distribution of their product”*. Pemberdayaan berdasarkan pengertian tersebut dapat diterjemahkan sebagai upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan

diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

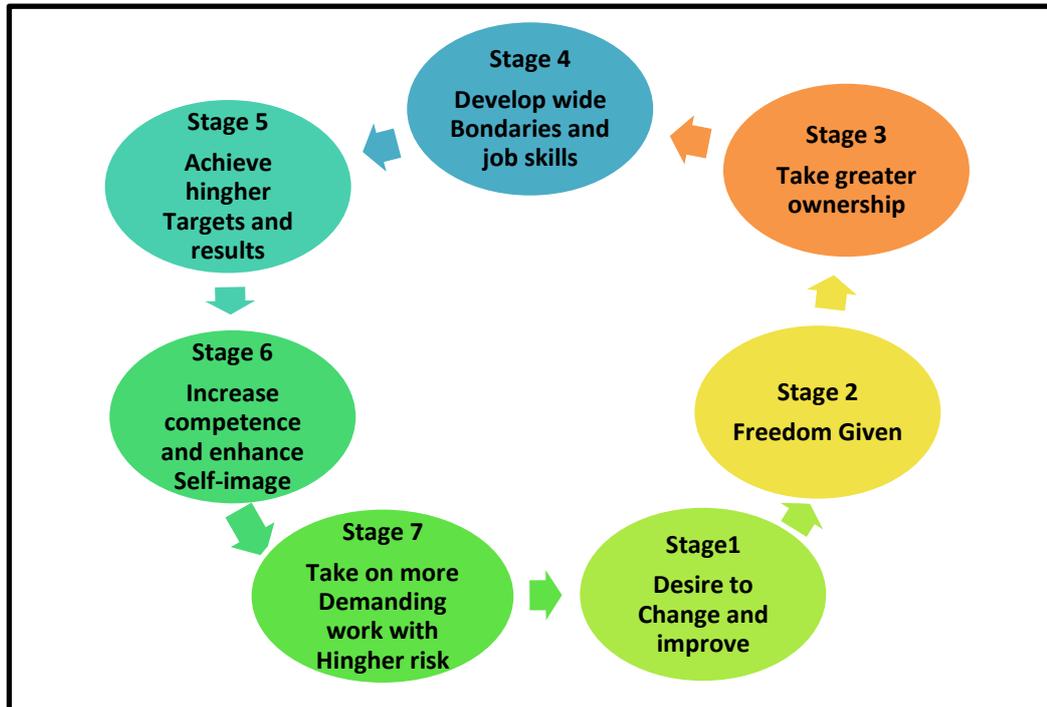
Melihat definisi dari para tokoh tersebut pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya memandirikan masyarakat melalui pengoptimalan penggunaan sumber daya yang dimiliki agar memiliki fungsi dan peran dalam meningkatkan derajat martabat masyarakat tersebut, yang semula tidak mampu menjadi mampu.

Dalam upaya memberdayakan masyarakat tersebut dapat dilihat dari tiga sisi menurut Totok Mardikanto (2013: 30), yaitu:

1. **Pertama**, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya mengembangkannya.
2. **Kedua**, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Perkuatan tersebut meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya.
3. **Ketiga**, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi tambah lemah, karena kurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat.

Wilson dalam Nyoman S. (2005:106) kemudian mengembangkan model-model sederhana dalam lingkaran pemberdayaan (*empowerment circle*), sebagai berikut pada Gambar 1.2.

**Gambar 1. 2**  
***The Empowerment Circle* menurut Therry Wilson (1996)**



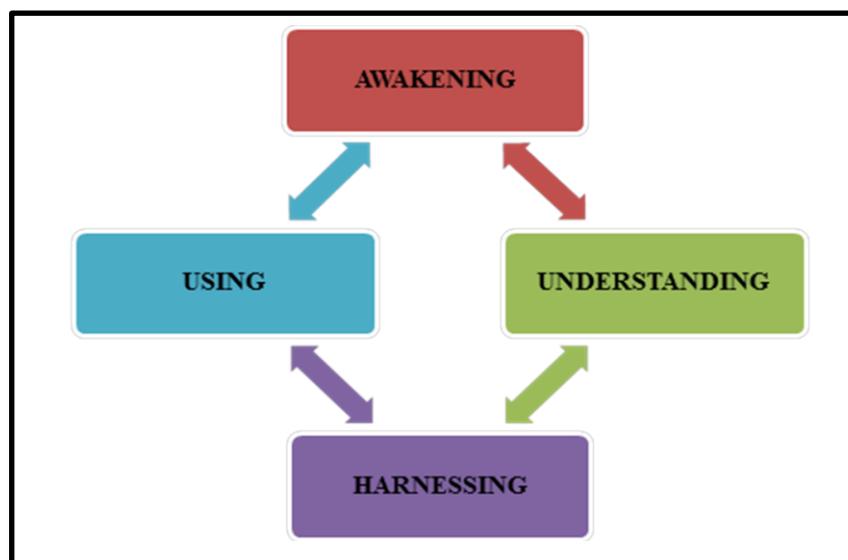
Sumber: Nyoman Sumaryadi (2005:107)

Seperti yang terdapat pada Gambar 1.2, dalam *empowerment circle* Wilson menunjukkan *the nature of empowerment* yang bekerja dalam suatu organisasi. Proses tersebut terdiri dari 7 langkah atau tahapan, proses tersebut berawal dari keinginan untuk berubah dan memperbaiki (*the desire to change and improve*) hingga *Take on moro Demanding work with Higher risks* (Sumaryadi, 2005:107-108).

Tahap Pertama adalah *the desire to change and improve*, merupakan tahap individu atau organisasi ingin melakukan perubahan dan memperbaiki diri. Berlanjut pada Tahap Kedua, yakni individu atau organisasi melepaskan halangan atau hambatan yang ditemukan dalam melakukan perubahan. Memasuki

Tahap Ketiga, individu mulai merasa memiliki tanggung jawab atas pekerjaan mereka. Tahap Keempat individu mulai memiliki keinginan untuk menambah peran dan tanggung jawab mereka. Tahap Kelima adalah tahap dimana hasil-hasil nyata dari pemberdayaan mulai nampak yang mengakibatkan kinerja yang lebih tinggi, menghasilkan peningkatan motivasi dalam mencapai target. Tahap Keenam terjadi perubahan perilaku dan sikap yang signifikan pada seorang individu, sehingga muncul kompetensi diantara individu. Tahap Ketujuh memperlihatkan bahwa seseorang telah menguasai pekerjaan mereka yang ada dan sedang mencari lebih banyak tantangan, sehingga memicu untuk melakukan perubahan kembali. Mewujudkan pemberdayaan yang berhasil, pasti melalui banyak proses yang harus ditempuh. Menurut Wilson (dalam Nyoman S., 2005:130) menyatakan ada 4 tahap proses pemberdayaan sebagai berikut.

**Gambar 1. 3**  
***Empowerment Process Menurut Terry Wilson (1996)***



*Sumber: Nyoman Sumaryadi (2005: 130)*

Tahap pertama berawal dari proses pemberdayaan individu adalah *awakening* merupakan proses pemberdayaan untuk mendorong individu menerima tantangan pemberdayaan. Tahap kedua dari pemberdayaan adalah *understanding*, yaitu memunculkan pemahaman dan persepsi baru yang sudah mereka dapat mengenai diri mereka sendiri, pekerjaan, aspirasi dan keadaan umum mereka, sehingga tau apa yang dibutuhkan dalam pemberdayaan dan pemberdayaan seperti apa yang akan dilakukan. Tahap ketiga dari proses pemberdayaan adalah *harnessing*, dalam tahap ini individu, merupakan tahap individu memutuskan seperti apa menggunakan ketrampilan yang dimiliki dalam pemberdayaan. Tahap terakhir adalah *using* yakni menggunakan ketrampilan dan kemampuan yang dimiliki dalam pemberdayaan sebagai kebiasaan.

Selain pemberdayaan harus dilakukan berdasarkan pada proses pemberdayaan juga memiliki beberapa ruang lingkup. Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, bahwasanya pemberdayaan harus dilakukan secara terus menerus, komprehensif, dan simultan samapai tercapai keseimbangan yang dinamis antara pemerintah dan masyarakat selaku yang diperintah.

Terdapat beberapa ruang lingkup yang diperhatikan dalam pemberdayaan menurut Ndraha (Nyoman S., 2005:145) adalah sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Politik, bertujuan meningkatkan *bargaining position* yang diperintah terhadap pemerintah. Melalui *bargaining* tersebut, yang diperintah (masyarakat) mendapatkan apa yang merupakan haknya dalam bentuk barang, jasa, layanan, dan kepedulian tanpa merugikan orang lain.
2. Pemberdayaan Ekonomi, dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan yang diperintah sebagai konsumen untuk berfungsi sebagai penanggung dampak negative pertumbuhan, pembayar,

- resiko salah urus, pemikul beban pembangunan, kambing hitam kegagalan program, dan penderitaan kerusakan lingkungan.
3. Pemberdayaan Sosial Budaya, yang bertujuan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui human *investment* guna meningkatkan nilai manusia (*human dignity*), penggunaan (*human utilization*) dan perlakuan seadil-adilnya terhadap manusia.
  4. Pemberdayaan Lingkungan, dimaksudkan sebagai program perawatan dan pelestarian lingkungan, supaya antara yang diperintah dan lingkungannya terdapat hubungan yang saling menguntungkan.

Dalam proses pemberdayaan terdapat beberapa indikator yang dapat diperhatikan demi keberlangsungan proses pemberdayaan tersebut. Wilson dalam Nyoman S (2005: 122-128), memberikan pendapat tentang indikator yang mempengaruhi akibat adanya pemberdayaan dalam organisasi, yang pada intinya adalah:

1. Reputasi, merupakan derajat penilaian organisasi yang dapat digunakan untuk memberikan informasi dalam pemberdayaan.
2. Fokus Manajemen, upaya cara manajemen yang dilakukan untuk menciptakan keberhasilan pemberdayaan.
3. Manajemen Pemberdayaan, mengacu pada pemahaman dan pengelolaan pemberdayaan oleh para pemimpin/birokrat.
4. Atmosfir, merupakan suasana dalam pemberdayaan, apakah dalam pemberdayaan terdapat komitmen, dan semangat atau tidak.
5. Kepemimpinan, meliputi gaya seorang kepemimpinan seorang manajer/birokrat dalam menggerakkan bawahannya demi tercapainya tujuan pemberdayaan.

6. Mengeluarkan kesanggupan manusia, merupakan upaya yang dilakukan untuk mendorong individu menggunakan ketrampilan dan kemampuannya dalam pemberdayaan.
7. Pengakuan dan Penghargaan, cenderung kepada penilaian dalam bentuk dukungan dan penghargaan terhadap pemberdayaan yang dilakukan.
8. Inovasi, meliputi kebaruan dalam pemberdayaan untuk mempermudah tercapainya tujuan pemberdayaan.
9. Kepercayaan, mencakup keyakinan dan keterbukaan individu mengambil resiko dalam pemberdayaan.
10. *Teamwork*, penggunaan kemampuan secara bersama antar individu satu dengan yang lainnya dalam bentuk kerjasama untuk keberhasilan pemberdayaan.
11. Pengambilan dan Pengendalian Keputusan, sikap yang dilakukan baik dari pemimpin maupun yang dipimpin dalam mengambil keputusan dan mengendalikan pemberdayaan yang dilakukan.
12. Komunikasi, keterbukaan antar individu satu dan individu lainnya dalam menyampaikan informasi.
13. Masyarakat, meliputi penerimaan, kepuasan, dan partisipas yang dilakukan dalam pemberdayaan.
14. Struktur dan Prosedur, mencakup tata cara yang dilakukan untuk mendorong keberhasilan pemberdayaan.
15. Tujuan Organisasi, meliputi kontribusi pemberdayaan dalam pencapaian tujuan organisasi yang telah ditentukan.

Konsep pemberdayaan masyarakat sendiri sangat berkaitan dengan struktur ketimpangan. Struktur yang timpang mengandung arti bahwa ada sebagian pihak yang memiliki, kekuatan dan kemauan untuk memenuhi kebutuhan, sedangkan pihak lainnya masih kesulitan memenuhi kebutuhannya karena ketidak berdayaannya tersebut. Sehingga untuk meningkatkan akses, kekuatan dan kemampuan pihak yang tidak berdaya tersebut butuh dilakukan pemberdayaan (Amanah & Farmayanti, 2014: 3).

Menurut Amanah & Farmayanti (2014: 3) melaksanakan program pemberdayaan dapat dikatakan berhasil dilihat dari kondisi masyarakat yang memiliki ciri-ciri mandiri, inovatif, daya juang tinggi, mampu menggalang kerjasama, dan dapat menentukan keputusan atas berbagai pilihan yang ada. Keberdayaan masyarakat dapat dilihat secara kelompok, yang selanjutnya Amanah dkk (2014: 4) menguraikannya ciri-ciri tersebut sebagai berikut:

- a. Memiliki visi dan misi yang jelas
- b. Ada kerjasama dalam mencapai tujuan
- c. Kepemimpinan yang situasional
- d. Adanya program dan kegiatan usaha produktif.
- e. Adanya komunikasi yang efektif dan pembelajaran
- f. Adanya sarana dan prasarana kelompok
- g. Adanya tekanan untuk berkinerja lebih baik lagi
- h. Adanya proses kaderisasi, dan
- i. Pembinaan anggota.

Ciri-ciri dari keberdayaan tersebut menuntut adanya upaya kegiatan pemberdayaan yang mampu mendorong terciptanya ciri-ciri tersebut di dalam masyarakat. Berdasarkan Surat Edaran Bupati Nomor 142.22/579 Tentang

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2017, terdapat bentuk-bentuk kegiatan pemberdayaan yang dapat dibiayai dari Alokasi Dana Desa tersebut yang meliputi:

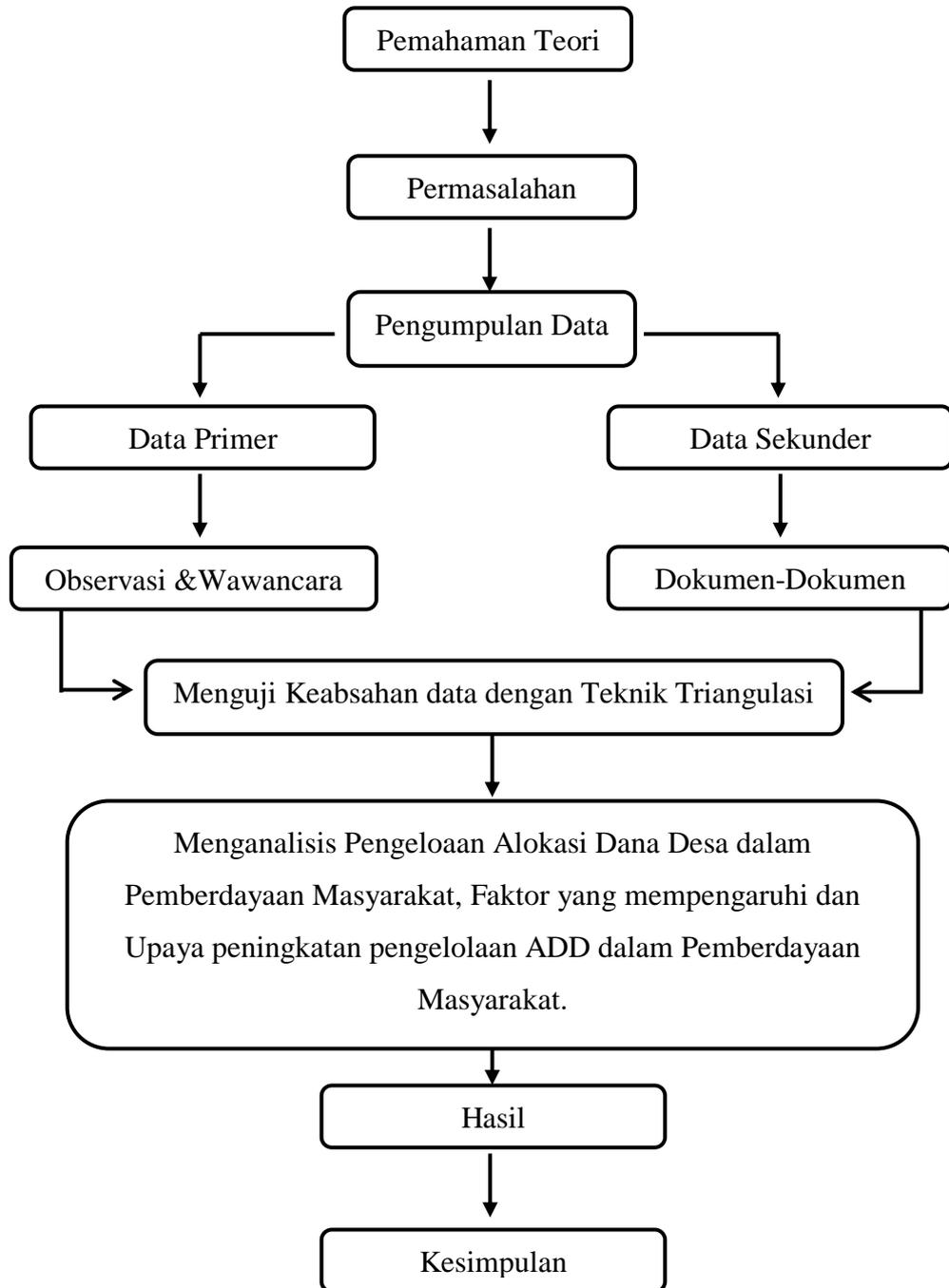
- 1) Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- 2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat.
- 3) Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB.
- 4) Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
- 5) Kegiatan Pelatihan Teknologi Tepat Guna.
- 6) Kegiatan Pembardayaan Usaha Kecil dan Industri Rumah Tangga.

Melihat hal tersebut pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk kegiatan pemberdayaan yang mencakup kegiatan tersebut akan mampu mendorong masyarakat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki sehingga masyarakat menjadi berdaya dengan ciri-ciri yang telah dipaparkan tersebut. Sehingga dalam penelitian ini melihat Alokasi Dana Desa sebagai bentuk pembiayaan kegiatan pemberdayaan masyarakat harus dikelola dengan baik agar masyarakat menjadi berdaya sesuai dengan ciri-ciri keberdayaan kelompok.

### **1.5.7 Alur Pemikiran**

Upaya mempermudah melihat langkah yang dilakukan dalam melakukan penelitian ini maka peneliti membuat alur atau konsep penelitian sebagai pada Gambar 1.4.

**Gambar 1. 4**  
**Alur Pemikiran dalam Penelitian**



## 1.6 Operasionalisasi Konsep

### 1. Pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat

Untuk melihat pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan, penelitian ini melihat dari beberapa aspek sebagai berikut:

- a. Perencanaan (*planning*) penggunaan Alokasi Dana Desa dalam setiap proses pemberdayaan yang meliputi *awakening* (memberikan penyadaran), *understanding* (memberikan pemahaman) *harnessing* (pemanfaatan), dan *using* (penggunaan ketrampilan).
- b. Pengorganisasian (*organizing*) penggunaan Alokasi Dana Desa dalam setiap proses pemberdayaan yang meliputi *awakening* (memberikan penyadaran), *understanding* (memberikan pemahaman) *harnessing* (pemanfaatan), dan *using* (penggunaan ketrampilan).
- c. Pengarahan (*actuating*) penggunaan Alokasi Dana Desa dalam setiap proses pemberdayaan yang meliputi *awakening* (memberikan penyadaran), *understanding* (memberikan pemahaman) *harnessing* (pemanfaatan), dan *using* (penggunaan ketrampilan).
- d. Pengawasan (*controlling*) penggunaan Alokasi Dana Desa dalam setiap proses pemberdayaan yang meliputi *awakening* (memberikan penyadaran), *understanding* (memberikan pemahaman) *harnessing* (pemanfaatan), dan *using* (penggunaan ketrampilan).

2. Faktor yang mempengaruhi pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan antara lain dilihat dari beberapa aspek yakni:
  - a. Kepemimpinan, melihat komitmen pemimpin dalam melaksanakan pemberdayaan.
  - b. SDM pengelola keuangan, aparatur terkait yang melakukan pengelolaan keuangan desa.
  - c. Manajemen pengelolaan, keefektifan prosedur pengelolaan keuangan.
  - d. Partisipasi Masyarakat, berkaitan dengan sikap masyarakat dalam pengelolaan ADD dari perencanaan hingga pertanggung jawaban.
  - e. Budaya masyarakat, meliputi sikap keseharian masyarakat yang dapat mempengaruhi keefektifan pengelolaan alokasi dana desa.
3. Upaya meningkatkan pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Margomulyo, diuraikan dari beberapa aspek antara lain:
  - a. Upaya yang telah dilakukan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa
  - b. Upaya yang akan dilakukan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa

## **1.7 Metode Penelitian**

### **1.7.1 Desain Penelitian**

Keith F. Punch dalam Nugroho (2004: 28) mengelompokkan penelitian menjadi:

1. Penelitian kuantitatif
2. Penelitian kualitatif
3. Penelitian gabungan kuantitatif dan kualitatif

Pada penelitian pendekatan kualitatif, yaitu satu model penelitian humanistik, yang menempatkan manusia sebagai subjek utama dalam peristiwa sosial atau budaya. Sifat humanis dari aliran pemikiran kualitatif terlihat pada pandangan tentang posisi manusia sebagai penentu utama perilaku individu dan gejala sosial (Abdurrahman dan Muhidi, 2011: 9).

Bogdan dan Taylor, mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sehingga pada penelitian ini yang menggunakan pendekatan kualitatif akan memberikan gambaran atau uraian berupa tulisan hasil dari perilaku masyarakat yang diamati, dan menjelaskan secara mendalam atas fenomena penelitian yang dilihat dalam masyarakat tersebut.

Penelitian ini juga menggunakan desain studi kasus yang didasari karena Desa Margomulyo memiliki ciri khas yang berbeda dengan desa lainnya di Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Desa Margomulyo merupakan desa yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di Kecamatan Juwana, Desa Margomulyo juga memiliki luas wilayah yang cukup luas dengan lahan pertaniannya, selain itu pendapatan desa yang bersumber dari ADD di Desa Margomulyo juga merupakan pendapatan ADD terbesar kedua di Kecamatan Juwana.

### **1.7.2 Situs Penelitian**

Situs penelitian merupakan lokus atau tempat pelaksanaan penelitian. Pada penelitian ini, penulis memilih lokus di Desa Margomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah.

### **1.7.3 Subjek Penelitian**

Dalam penelitian ini, membutuhkan informasi dari *stakeholder* yang terkait dengan pengelolaan alokasi dana desa di Desa Margomulyo, yaitu:

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pati
2. Kepala Desa
3. Sekretaris Desa (Koordinator Pengelolaan ADD)
4. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)
5. Bendahara Desa
6. Masyarakat Desa

### **1.7.4 Jenis Data**

Jenis data yang digunakan merupakan data yang bukan bersifat numerik atau bukan angka-angka melainkan berupa uraian kata-kata atau kalimat-kalimat atau pernyataan-pernyataan.

### **1.7.5 Sumber Data**

Lofland dan Lofland dalam Nugroho (2014: 115), sumber data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah

tambahan, seperti dokumen dan lain-lain, termasuk diantaranya sumber data tertulis, dokumen rekaman suara dan foto, dan data statistik. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah:

1. Data Primer

Data primer yang digunakan yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan atau objek penelitian. Data tersebut berasal dari jawaban daftar pertanyaan yang diajukan atau ditanyakan kepada informan mengenai pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini berupa:

1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Alokasi Dana Desa.
4. Surat Edaran Bupati Nomor 142.22/579 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2017.

### 1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data, dilakukan melalui prosedur pengumpulan data dengan sejumlah teknik yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah mengumpulkan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang nampak pada objek yang diteliti sehingga dapat menunjang dalam penelitian. Observasi yang dilakukan berupa observasi terbuka dan tertutup. Observasi terbuka dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung. Artinya, pengamat secara terbuka diketahui oleh subjek dan subjek secara sukarela memberikan kesempatan untuk pengamat untuk mengamati peristiwa yang terjadi. Dengan melakukan pengamatan (observasi) akan memungkinkan pengamat memahami situasi secara keseluruhan dari objek penelitian dan memungkinkan adanya penemuan baru yang tidak terungkap pada saat wawancara.

2. Wawancara

Menurut Abdurahman dan Muhidi (2011:88) wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung secara bertatap muka (*personal face to face interview*) dengan sumber data (responden). Wawancara secara langsung, formal dan terstruktur akan dilakukan kepada informan yaitu aktor yang terkait dengan pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di

Desa Margomulyo. Wawancara yang dilakukan dilengkapi dengan alat bantu seperti buku catatan, *voice recorder* dan kamera.

### 3. Pengumpulan data sekunder

Pengumpulan data sekunder yaitu mengumpulkan data statistik, data perundangan dan data profil orang yang dinilai mempunyai peran penting dalam penelitian. Data yang akan dikumpulkan adalah:

- a. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Alokasi Dana Desa.
- d. Surat Edaran Bupati Nomor 142.22/579 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2017.

### 4. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan yaitu melakukan pengkajian konsep dan/atau teori yang berkenaan dengan penelitian, yaitu konsep dan/atau teori yang berkaitan dengan:

- a) Manajemen Publik, khususnya manajemen keuangan publik
- b) Administrasi Pembangunan, yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- c) Alokasi Dana Desa, khususnya yang berkaitan dengan Pemberdayaan Masyarakat

- d) Pemberdayaan Masyarakat, yang berkaitan dengan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam keberhasilan pembangunan
- e) Metode Penelitian, khususnya yang berkaitan dengan penelitian sosial dan metode penelitian kualitatif

Pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan pengumpulan data sekunder diperoleh dari narasumber yang ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, *snowball sampling* dan *incidental sampling* yang diuraikan sebagai berikut:

- 1) Teknik *Purposive sampling* merupakan teknik menentukan narasumber dengan tujuan atau pertimbangan tertentu, yang meliputi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati, Kepala Desa Margomulyo, Sekretaris Desa Margomulyo, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), Bendahara Desa.
- 2) Teknik *Snowball sampling* merupakan teknik penentuan narasumber yang bergulir sesuai arahan dari narasumber yang ditentukan melalui teknik *purposive*. Narasumber menggunakan teknik *snowball* ini berfungsi untuk memperdalam informasi dalam penelitian ini.
- 3) Teknik eksidental, teknik ini digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian, apabila data yang diperoleh dirasa kurang

lengkap. Penentuan teknik ini digunakan untuk menentukan narasumber dari masyarakat umum.

### **1.7.7 Analisis dan Interpretasi Data**

Analisis Data Kualitatif menurut Bogdan & Biklen (dalam Moelong, 2007: 248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan-bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

#### **1. Pengumpulan Data**

Pengumpulan Data merupakan upaya yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan sesuai dengan hasil wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Data awal yang dikumpulkan meliputi APBDes, RPJMDes, dan RKPDes.

#### **2. Reduksi Data**

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dan dicari tema dan polanya. Hal ini dilakukan karena data yang didapat dari lapangan akan sangat banyak jumlahnya.

### 3. Uji Keabsahan

Setelah melakukan reduksi data, selanjutnya diuji kebenaran/keabsahan dengan uji kredibilitas data. Pengujian data dilakukan dengan teknik triangulasi.

### 4. Penyajian Data

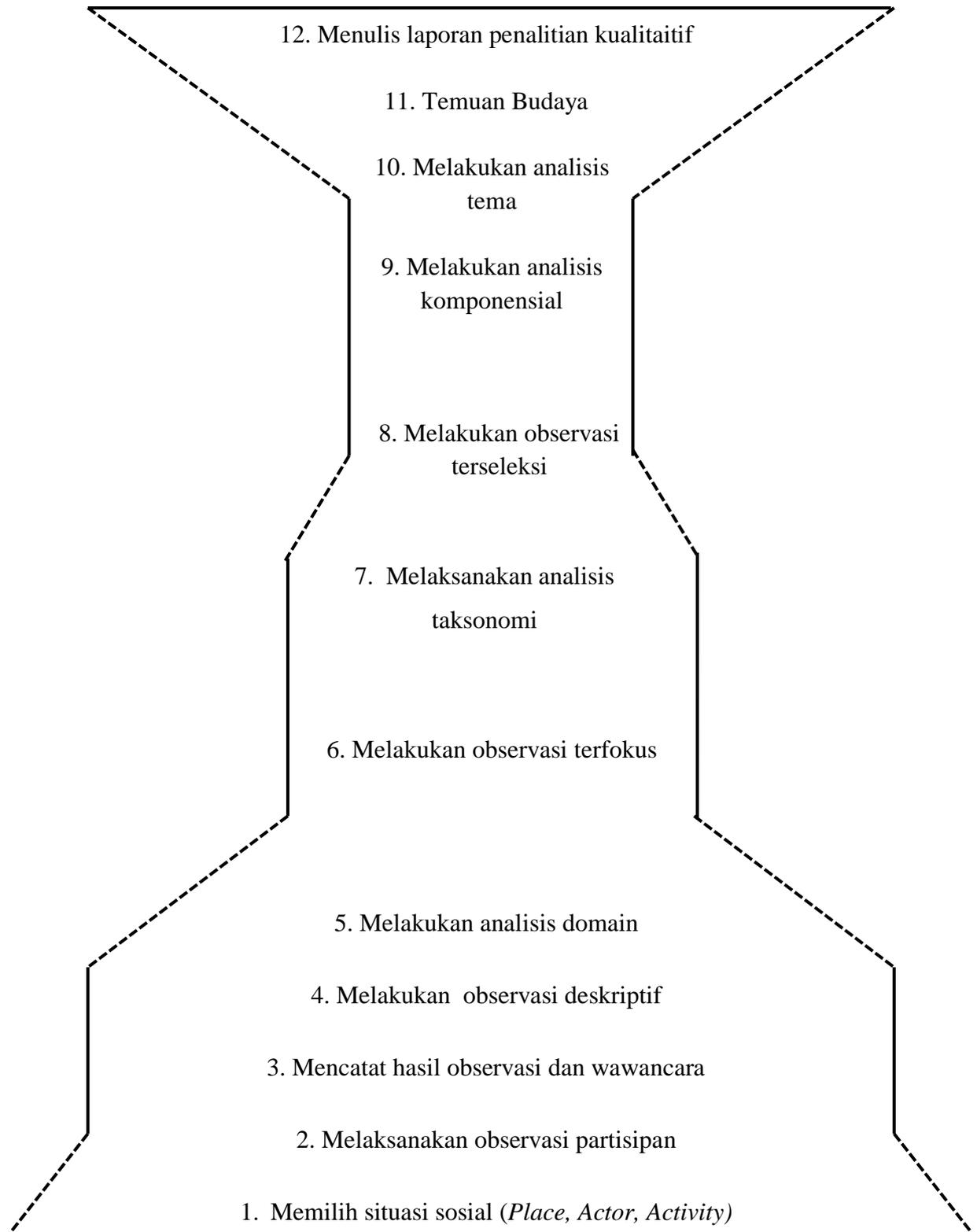
Data yang sudah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian singkat seperti grafik, tabel, diagram dan sejenisnya. Dengan cara seperti ini akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang terjadi.

### 5. Penarikan Kesimpulan

Langkah selanjutnya yang dilakukan yaitu dengan menarik kesimpulan yang bersifat sementara karena pada suatu waktu dapat berubah jika ditemukan bukti yang kuat untuk pengumpulan data berikutnya.

Analisis data selama dilapangan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis data menurut Spradley. Spradley (1980) dalam Sugiyono (2016: 345-362) membagi analisis data dalam berbagai tahapan sebagai berikut pada Gambar 1.5.

**Gambar 1. 5**  
**Tahap Penelitian Kualitatif Menurut Spradley**



*Sumber: Sugiyono (2016:346)*

Analisis data selama dilapangan pada penelitian ini dibagi dalam beberapa langkah sesuai dengan Gambar 1.5 Penelitian ini dimulai dari menentukan *key informan* atau informan kunci; yang dilanjutkan dengan sesi tanya jawab atau wawancara yang hasilnya dicatat; selanjutnya dianalisis melakukan analisis domain yakni analisis untuk memperoleh gambaran secara umum; dilanjutkan dengan analisis taksonomi yang berusaha menjabarkan domain menjadi lebih rinci dan fokus; kemudian melakukan analisis komponensial dengan mengontraskan data yang ada; dan selanjutnya analisis tema dengan mencari hubungan antar domain secara menyeluruh.

### **1.7.8 Kualitas Data**

Menurut Creswell & Miller (2012: 286) Validitas merupakan kekuatan lain dalam penelitian kualitatif selain reliabilitas. Validitas ini didasarkan pada kepastian apakah hasil penelitian sudah akurat dari sudut pandang peneliti, partisipan atau pembaca secara umum. Strategi validitas data yang dikemukakan oleh Creswell adalah sebagai berikut:

1. Mentrangulasi (triangulate) sumber-sumber data yang berbeda dengan memeriksa bukti-bukti yang berasal dari sumber-sumber tersebut dan menggunakannya untuk membangun justifikasi tema-tema secara koheren. Tema-tema yang dibangun berdasarkan sejumlah sumber data atau perspektif dari partisipan akan menambah validitas penelitian.
2. Menerapkan member checking untuk mengetahui akurasi hasil penelitian. *Member checking* ini dapat dilakukan dengan membawa kembali laporan

akhir atau deskripsi-deskripsi atau tema-tema spesifik ke hadapan partisipan untuk mengecek apakah mereka merasa bahwa laporan / deskripsi / tema tersebut sudah akurat.

3. Memberikan deskripsi yang kaya dan padat (*rich and thick description*) tentang hasil penelitian. Deskripsi ini setidaknya harus berhasil menggambarkan *setting* penelitian dan membahas salah satu elemen dari pengalaman-pengalaman partisipan.
4. Mengklarifikasi bias yang mungkin dibawa peneliti ke dalam penelitian. Dengan melakukan refleksi diri terhadap kemungkinan munculnya bias dalam penelitian, peneliti akan mampu membuat narasi yang terbuka dan jujur yang akan dirasakan oleh pembaca.
5. Menyajikan informasi “yang berbeda” atau “negatif” (*negative or discrepant information*) yang dapat memberikan perlawanan pada tema-tema tertentu.
6. Memanfaatkan waktu yang relatif lama (*prolonged time*) di lapangan atau lokasi penelitian.
7. Melakukan tanya-jawab secara sesama rekan peneliti (*peer de briefing*) untuk meningkatkan keakuratan hasil penelitian. Proses ini mengharuskan peneliti mencari seorang rekan (*a peer debriefer*) yang dapat mereview untuk berdiskusi mengenai penelitian kualitatif sehingga hasil penelitiannya dapat dirasakan oleh orang lain, selain oleh peneliti sendiri.
8. Mengajak seorang auditor (*external auditor*) untuk mereview keseluruhan proyek penelitian.

Menurut Denzim dan Kimchi dkk (dalam Abdurrahman dan Muhidi, 2011:101) ada lima tipe Triangulasi yaitu sebagai berikut:

1. Triangulasi teoritis, yaitu menggunakan kerangka kerja dan hipotesis yang berbeda untuk studi yang sama.
2. Triangulasi data, yaitu melakukan pengumpulan data untuk menguji peristiwa yang dialami oleh kelompok yang berbeda, pada waktu yang berbeda.
3. Triangulasi metode, yaitu triangulasi yang digunakan pada penelitian sosial.
4. Triangulasi investigator, yaitu triangulasi yang muncul ketika dua atau lebih investigator peneliti terlatih dengan beragam latar belakang mengeksplorasi fenomena yang sama.
5. Triangulasi analisis, yaitu triangulasi yang melibatkan penggunaan satu atau lebih teknik analisis untuk menganalisis seperangkat data yang sama untuk tujuan validasi.

William wiersma dalam Sugiyono (2016: 372-374), mengartikan triangulasi sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, cara dan waktu sehingga terdapat tiga (3) cara triangulasi yakni triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu, yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Triangulasi sumber merupakan, uji validitas dengan cara mengecek data yang diperoleh dari sumber yang berbeda.
- b. Triangulasi teknik merupakan, uji kredibilitas dengan mengecek data kepada sumber yang sama melalui teknik yang berbeda, bisa

menggunakan wawancara, yang dilanjutkan dicek dengan studi kepustakaan, dokumentasi, dan observasi

- c. Triangulasi waktu, merupakan uji data dengan sumber yang sama pada waktu yang berbeda.

Pada Penelitian ini pengujian validitas data menggunakan triangulasi sumber. Dimana peneliti tidak hanya mencari sumber informasi dengan mewawancarai satu informan saja, melainkan melakukan wawancara lagi dengan informan yang berbeda untuk mendapatkan informasi yang benar sesuai fakta dilapangan. Kemudian memastikan kebenaran atau validitas data dengan menganalisis data hasil wawancara dengan kondisi dilapangan dengan cara observasi dan dokumentasi.

